

# Majalah Pengembangan <sup>Bi</sup> Ilmu-ilmu Sosial

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro



**Pendidikan Komunikasi  
Antar Budaya**  
*Turnomo Rahardjo*

**Potensi Konflik  
di Desa**  
*Fitriyah*

**Faktor Komunalisme dalam Konflik  
Antar Agama di Indonesia**  
*Yuwanto*

**Resolusi Konflik**  
*Joyo Nur Suryanto Gono*

MPIIS - FORUM	Vol. 30	No. 2	Hlm. 54-134	Semarang Agustus 2001	ISSN 0126-0731
---------------	---------	-------	----------------	--------------------------	-------------------



# Majalah Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

## DAFTAR ISI

### Topik

**Turnomo Rahardo :**

Pendidikan Komunikasi Antarbudaya (54)

**Yuwanto :**

Faktor Komunalisme dalam Konflik Antar Agama di Indonesia (63)

**Harmeni S. :**

Kebersamaan dalam Perbedaan Masyarakat Pribumi dan Non Pribumi di Singkawang Kalimantan Barat (69)

**Fitriyah :**

Potensi Konflik di Desa (75)

**Wiwik Widayati :**

Reformasi Agraria dan Konflik Pertanahan (81)

**Joyo Nur Suryanto Gono :**

Resolusi Konflik (86)

### Analisis

**Teguh Yuwono :**

Pers. Otonomi Daerah dan Demokrasi (91)

**Sunarto :**

Membangun Sistem Komunikasi dan Informasi Kehumasan pada Daerah Otonom (97)

**Fajar Junaidi :**

Marxisme Memandang Masalah Kebangsaan

**Hartono Sastrosukaryo :**

Pemberantasan Korupsi : Tidak Cukup *Political Will* (112)

**Sri Suwatri :**

Penjaringan Calon Rektor Universitas Diponegoro Periode 2002 - 2006 (117)

**Tri Yuningsih, Ida Hayu Mawanti**

Pemimpin dan Manajemen Kepegawaian (122)



Karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk (*plural society*) sangat memungkinkan terjadinya pertikaian bemuansa SARA. Mengapa demikian? Karena masyarakat terbelah (*divided*) ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kulturalnya. Dalam kesehariannya, mereka melakukan identifikasi kultural (*cultural identification*), dalam arti masing-masing individu mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi kultural ini, menurut Rogers & Steinfatt (1999:97), akan menentukan individu-individu yang termasuk dalam *ingroup* dan individu-individu yang termasuk dalam *outgroup*. Bagaimana mereka berperilaku, sebagian ditentukan oleh apakah mereka termasuk dalam kelompok budaya tertentu atau tidak.

Dalam masyarakat yang terbelah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural sulit dicapai keterpaduan sosial (*societal cohesion*) di antara mereka.



# Resolusi Konflik

Oleh : Joyo Nur Suryanto Gono

## Ringkasan :

Tulisan ini membahas mengenai peran komunikasi dalam resolusi konflik. Kasus konflik Ambon Maluku dipergunakan sebagai contoh kasus. Sifat konflik Ambon Maluku yaitu konflik politik identitas komunal etnis-agama. Selain berdimensi horizontal antar etnis-agama, juga berdimensi vertikal antara elit-massa. Pendekatan untuk mengatasi konflik adalah mengembangkan dialog-dialog informal di semua lapisan masyarakat. Melalui komunikasi interpersonal secara intensif persuasi dan mediasi informal seperti tokoh-tokoh agama; tokoh-tokoh masyarakat; tokoh-tokoh pemuda; kepala adat, berperan besar dalam membangun keterbukaan komunikasi di semua lapisan. Ide yang dikembangkan dalam komunikasi itu mengarah kepada transformasi konflik untuk mencapai kerjasama sosial ekonomi yang lebih adil.

## Abstract :

*This article is concern with communication role in conflict resolution. Ambon Maluku conflict case is used for case example. The natures of Ambon Maluku conflict are ethnic-religion communal political identity conflict. Beside horizontally dimension about ethnic-religion, vertically about mass-elite. An approach to conflict resolution is developing informal dialogues for community all levels. With interpersonal communication intensify, persuasion of informal mediation by leaders of religion, social, young generation, tribe, may create community communication openness at all. An idea of communication in turn to conflict transformation for more welfare economy-social relationship.*

**Keywords :** Conflict Resolution, Conflict Transformation, Informal dialogues communication

## A. Pendahuluan

Ketika memasuki akhir babak era orde baru kita dikejutkan dengan konflik horizontal di Maluku. Pertikaian itu terjadi antara dua kelompok yaitu kelompok Kristen dengan Kelompok Islam. Peristiwa yang sangat dahsyat karena setiap pertikaian disertai dengan adu senjata, baik senjata tajam; senjata api rakitan; bom molotov; dan lain-lain, sehingga hingga kini korban meninggal maupun sakit berjumlah ribuan. Akibat dan konflik adalah kehancuran berbagai sarana sosial-ekonomi: Gereja, masjid, pasar, perumahan, harta benda. Dan secara sosial juga hancurnya hubungan kekerabatan yang

telah terjalin secara harmonis selama bertahun-tahun. Banyak warga masyarakat yang tidak mengalami konflik secara langsung menjadi pengungsi, yang hidupnya sangat tergantung dari belas kasih pihak lain. Konflik Ambon Maluku ini rupanya hanya salah satu dan berbagai daerah yang memiliki potensi konflik yang besar. Terbukti bahwa daerah lain di Indonesia juga menjadi medan pertikaian horizontal yang memiliki tingkat kedahsyatan yang tinggi yaitu: Pontianak, Sambas, Kabupaten Poso, Jawa Timur, Aceh.

Bagi wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas

sosial tinggi, seperti Indonesia, potensi konflik yang besar. Se konflik itu pada dasarnya terkondisikan sejak lama, jauh konflik 'laten' itu kemudian konflik terbuka sejak Januari akar konflik Maluku sebenarnya laten itu. Potensi dan benih sudah tertanam sejak lama konstelasi hubungan mengandung potensi ketegangan (Trijono, 2001). Dan aspek membesar di berbagai daerah mengancam integritas Negara Indonesia. Untuk itu berbagai dilakukan sejak lama agar tercipta

Pokok persoalan yang perhatian dalam tulisan ini adalah komunikasi dalam resolusi kelompok yang bertikai. Konflik diungkapkan hanya sebagai melihat persoalannya.

## B. Pembahasan

Miall, Ramsbotham, mengemukakan konflik adalah tidak mungkin dihindari dalam Konflik merupakan ekspresi kepentingan, nilai, dan keyakinan formasi baru yang ditimbulkan yang muncul bertentangan dan diwariskan. Konflik dapat bersenjata menunjukkan konflik pada kedua sisi berusaha menyelesaikan Konflik jenis ini dapat meliputi seperti pertempuran militer terhadap penduduk sipil oleh pihak perang total dengan korban dengan kekerasan atau konflik



sosial tinggi, seperti Indonesia, terkandung didalamnya potensi konflik yang besar. Seperti di Ambon Maluku, konflik itu pada dasarnya secara "laten" sudah terkondisikan sejak lama, jauh sebelum Januari 1999. Konflik 'laten' itu kemudian "manifest" menjadi konflik terbuka sejak Januari 1999. Boleh dikatakan, akar konflik Maluku sebenarnya berada pada konflik laten itu. Potensi dan benih-benih konflik sebenarnya sudah tertanam sejak lama dalam struktur dan konstelasi hubungan antar kelompok yang mengandung potensi ketegangan dan benturan konflik (Trijono, 2001). Dan aspek politik konflik yang membesar di berbagai daerah di Indonesia dapat mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan sejak lama agar tercapai kesepakatan damai.

Pokok persoalan yang akan menjadi fokus perhatian dalam tulisan ini adalah bagaimana peran komunikasi dalam resolusi konflik antara dua kelompok yang bertikai. Konflik Maluku disini diungkapkan hanya sebagai latar belakang untuk melihat persoalannya.

## B. Pembahasan

Miall, Ramsbotham, Woodhouse (2001) mengemukakan konflik adalah aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Konflik dapat terdiri dari: *konflik bersenjata* menunjukkan konflik di mana pihak-pihak pada kedua sisi berusaha menggunakan kekuatan. Konflik jenis ini dapat meliputi situasi berkelanjutan seperti pertempuran militer atau penyerangan terhadap penduduk sipil oleh tentara sampai dengan perang total dengan korban sangat besar. *Konflik dengan kekerasan atau konflik maut*, sama dengan

konflik bersenjata, tetapi juga termasuk didalamnya kekerasan satu sisi seperti pemusnahan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Yang dimaksud adalah kekerasan langsung secara fisik. *Konflik Kontemporer* menunjuk pada pola yang berlaku pada dunia dimasa pasca Perang Dingin; *Konflik bersenjata Kontemporer* hanya menunjuk pada pihak-pihak yang dalam pertikaianya menggunakan senjata.

Manusia memang tidak bisa menghilangkan perbedaan-perbedaan, bahkan secara struktural. Konflik terjadi bisa karena perbedaan pemahaman atas simbol yang mereka terima, perbedaan persepsi, hingga perbedaan sikap. Pada tingkatan paling rendah konflik berbentuk perbedaan pendapat, tetapi pada tingkatan paling tinggi adalah konflik bersenjata. Ilmu komunikasi mengajarkan kepada kita untuk berbagi ide-ide secara sosial (socially sharing of idea), sehingga perubahan sosial akan mengarah kepada proses kemajuan. Masyarakat akan dapat saling memahami intensi informasi yang mereka terima, mengembangkan referensi, saling belajar. Konflik sara di berbagai tempat di Indonesia dewasa ini mengajarkan kepada kita bahwa informasi yang berkembang di masyarakat mengandung unsur-unsur pemaksaan yang luar biasa oleh-pihak-pihak tertentu. Pada episode konflik Maluku, jelas nampak bahwa kelompok Kristen mendominasi medan konflik atas kelompok Muslim.

Dalam konflik Ambon Maluku telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian konflik baik dilakukan oleh masyarakat mereka sendiri maupun melalui pihak ketiga. Hal itu menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuatan konflik dipercaya terdapat pula kekuatan integrasi yang menyertainya, dua kekuatan itu saling tarik menarik, sehingga keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut *George Simmel*, ketika sebuah kelompok berkonflik dengan kelompok lain, implisit di dalamnya sebenarnya telah terjadi integrasi dan kohesi ke dalam di dalam kelompoknya untuk menghadapi lawan kelompok lain itu.



Sebaliknya, ketika integrasi sosial yang lebih besar dicapai, maka implisit di dalamnya telah terjadi friksi dan konflik internal antar kelompok di dalam komunitas sosial bersangkutan (Simmel dalam Trijono, 2001).

*Resolusi Konflik* merupakan istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah. (Miall, Ramsbotham, Woodhouse (2001). Konflik Ambon Maluku telah mengalami upaya resolusi konflik. Upaya pemerintah daerah diprakarsai oleh gubernur Saleh Latuconsina membentuk Pusat Rujuk Sosial Semula beranggota 6 orang tokoh masyarakat Ambon dari berbagai Agama: Islam, Katholik, Kristen. Mereka adalah Thamrin Elly, Lutfhy Sanaky, John Ruhulesin, M.G. Lailosa, Bruno Romyaru, Codratus Ufie. Akan tetapi sejak 1 Maret 1999, PRS ditambah anggotanya oleh pemerintah dari beberapa kalangan ahli, birokrasi, tokoh agama, dan para kepala adat, dan tokoh masyarakat (Trijono, 2001) Lembaga ini kurang berfungsi efektif karena lemahnya kelembagaan dan pecahnya konflik episode kedua yang lebih luas.

Selain PRS, Gubernur juga membentuk lembaga baru yang dikenal dengan *Tim Fasilitator Pemda*. Tim ini lebih melakukan pendekatan ke lapisan bawah, di tingkat-tingkat Desa. Walaupun masih berkesan formal karena anggotanya terdiri dari para pegawai Pemda tetapi cara kerjanya lebih informal. Kemajuan yang telah dicapai dari tim fasilitator ini adalah bisa menarik partisipasi warga masyarakat, khususnya para tokohnya. Walaupun demikian kesan formal yang nampak dari tim ini menghambat untuk dapat menarik tokoh-tokoh strategis informal di desa-desa. Gubernur juga membentuk *Tim 24 dan Forum jaringan pengamanan lingkungan* anggotanya terdiri dari 24 tokoh pemuda yang memiliki pengaruh terhadap pemuda di lapangan. Tim ini

hasil kerjanya tidak diketahui. *Pertemuan Latupati dan Kepala Desa*. Butir-butir kesepakatan merupakan kesepakatan yang lebih konkrit mengarah ke masalah transportasi, pendidikan, netralitas kerja aparat di suatu wilayah.

Kesepakatan damai yang dihasilkan di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tanggal 12 Pebruari 2002 merupakan resolusi yang dihasilkan atas fasilitasi pihak pemerintah pusat. Walaupun telah tercapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk butir-butir kesepakatan, tetapi nampaknya upaya ini akan mengalami hambatan dalam sosialisasi yang tidak kecil. Sebab tujuan penyelesaian konflik adalah mentransformasikan konflik dengan kekerasan yang ada atau yang berpotensi untuk ada dan menjadi proses perubahan sosial dan politik penuh damai (tanpa kekerasan). Sifat formal dan perjanjian Malino ini justru melekat dalam proses resolusi damai itu.

Di samping lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah terdapat beberapa LSM mengupayakan rekonsiliasi antara lain *Tim 20 Wayame*, *LSM Baileo*, *Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TIRUS)*, *Gerakan Perempuan Peduli (GPP)*. Hampir semua LSM ini cara kerjanya mencoba mengambil jarak dari semua upaya bersifat birokratis dan atas, bahkan dalam beberapa hal menolak intervensi dari atas dan melakukan resistensi terhadap represi konflik dan kekuasaan lebih tinggi. Kunci keberhasilan dari kelompok-kelompok LSM terletak pada kemampuannya memelihara *komunikasi dialogis* terus menerus secara horizontal antara tokoh Muslim dan Kristen, secara vertikal antara tokoh-tokoh tersebut dengan warganya. Prinsip-prinsip komunikasi mediasi yang diterapkan dan disepakati bersama adalah *saling terbuka, saling jujur saling mendukung, saling menerima, ikhlas bekerja, beriman teguh pada nilai Ketuhanan*. Prinsip lain untuk bersikap antara lain *non-sektarian, independen, non etnik, non agama, non partisan*.

Lembaga-lembaga rekonsiliasi di atas berperan

sebagai mediasi, yang merupakan pihak ketiga dilakukan secara netral. Pihak yang bertikai dapat merasa puas atas kemurnian hasil mediasi. Mediasi mengandung makna yang sangat penting atau fasilitasi dan merujuk pada menjadi penengah guna membantu untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik.

Peran komunikasi sangat penting dalam masyarakat pasca konflik. Dengan konflik dapat diwujudkan basis baru pada upaya membangun komunitas horizontal secara terus menerus.

Transformasi konflik merupakan suatu tertentu dalam sebuah konflik yang tujuannya mentransformasikan konflik yang tidak adil. Melalui transformasi dimaksud sebagai transisi dari konflik yang mengimplikasikan hubungan mendalam pada pihak-pihak serta perubahan dalam situasi konflik. Jadi transformasi konflik merupakan perubahan terdalam pada konflik. Masa merupakan suatu menuju rekonsiliasi yang merupakan rekonsiliasi merupakan suatu upaya resolusi konflik masyarakat. Atau dapat dikatakan rekonsiliasi merupakan proses rujukan dan pemulihan antara pihak-pihak berkonflik ke suatu koeksistensi damai, hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain, satu sama lain. (Assefa dan Rekonsiliasi merupakan suatu metode maupun sebuah cara dilakukan untuk menemukan menjadi sumber konflik. Tim 24 bekerja untuk mengubah konflik berkonflik permusuhan menjadi kerjasama.



diketahui. Pertemuan Latupati Butir-butir kesepakatan kesepakatan yang lebih konkrit adalah transportasi, pendidikan, dan kesehatan di suatu wilayah.

Perjanjian yang dihasilkan di Malino, Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 1946 merupakan resolusi yang dihasilkan pemerintah pusat. Walaupun telah terdapat kesepakatan, tetapi nampaknya masih ada hambatan dalam sosialisasi dan pelaksanaan tujuan penyelesaian konflik. Akibatnya penyelesaian konflik dengan kekerasan berpotensi untuk ada dan menjadi ancaman sosial dan politik penuh damai. Perjanjian formal dan perjanjian Malino merupakan proses resolusi damai itu.

Organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mencapai beberapa LSM mengupayakan penyelesaian konflik. Tim 20 Wayame, LSM Baileo, Gerakan Pemuda (GPP), Kemanusiaan (TIRUS), Gerakan Pemuda (GPP). Hampir semua LSM ini berusaha mengambil jarak dari semua pihak, baik dari atas, bahkan dalam melakukan intervensi dari atas dan tidak terdapat represi konflik dan pelanggaran. Kunci keberhasilan dari proses LSM terletak pada kemampuan memelihara komunikasi dialogis antara horizontal antara tokoh-tokoh masyarakat, cara vertikal antara tokoh-tokoh masyarakat dan warganya. Prinsip-prinsip yang diterapkan dan disepakati adalah saling terbuka, saling jujur saling menghormati, ikhlas bekerja, dan nilai Ketuhanan. Prinsip lain yang diterapkan adalah non-sektarian, independen, dan non-partisan.

Peran rekonsiliasi di atas berperan

sebagai mediasi, yang merupakan fungsi komunikasi pihak ketiga dilakukan secara sukarela dimana pihak-pihak yang bertikai dapat mempertahankan kendali atas kemurnian hasil mediasi. Dalam mediasi murni terkandung makna yang sangat dekat dengan konsiliasi atau fasilitasi dan merujuk pada usaha-usaha untuk menjadi penengah guna mendorong pihak yang bertikai untuk bergerak menuju ke negosiasi.

Peran komunikasi sangat besar dalam membangun masyarakat pasca konflik. Bagaimana transformasi konflik dapat diwujudkan bisa jadi amat tergantung pada upaya membangun komunikasi dialogis horizontal secara terus menerus.

Transformasi konflik memiliki peran penting tertentu dalam sebuah konflik tidak seimbang, yang tujuannya mentransformasikan hubungan sosial yang tidak adil. Melalui transformasi konflik dimaksud sebagai transisi bagi proses perdamaian yang mengimplikasikan sebuah perubahan hubungan mendalam pada pihak-pihak yang bertikai serta perubahan dalam situasi menciptakan konflik. Jadi transformasi konflik merupakan tingkat perubahan terdalam pada proses penyelesaian konflik. Masa merupakan masa transisi untuk menuju rekonsiliasi yang menurut Hizkias Assefa rekonsiliasi merupakan tujuan akhir dari semua upaya resolusi konflik masyarakat pasca konflik. Atau dapat dikatakan rekonsiliasi merupakan proses rujukan dan pemulihan hubungan yang retak antara pihak-pihak berkonflik menjadi hubungan koeksistensi damai, hidup berdampingan tidak saling mengganggu satu sama lain, dan kerjasama sosial satu sama lain. (Assefa dalam Trijono, 2001). Rekonsiliasi merupakan proses, bukan sekedar metode maupun sebuah cara resolusi konflik yang dilakukan untuk menemukan penyelesaian yang menjadi sumber konflik. Tetapi sebuah proses yang bekerja untuk mengubah hubungan pihak-pihak berkonflik permusuhan menuju pertemanan dan kerjasama.

Dalam kasus Ambon Maluku sifat konflik telah nampak dengan munculnya kesamaan persepsi atas konflik itu, yaitu konflik politik identitas komunal etnis-agama. Selain berdimensi horizontal antar etnis-agama, juga berdimensi vertikal antara elit-massa. Konflik ini juga merupakan konflik politik elit yang menggunakan identitas agama sebagai basis konflik. Ketika konflik berlangsung hampir semua masyarakat terjebak dalam situasi konflik, dan isu yang berkembang selalu berkait dengan isu agama dan etnis sehingga, menurut Lambang Trijono, sulit dinegosiasi dan dikompromikan.

Memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai konflik, sambil mempertimbangkan sifat-sifat konflik itu, maka peran komunikasi dalam membuka jalur dialog menjadi tidak mudah. Namun secara garis besar ada beberapa prinsip yang dapat dikemukakan dalam mencapai rekonsiliasi yang mencakup beberapa elemen menurut Hizkias Assefa sebagai berikut:

1. Pengakuan jujur dan terbuka dari masing-masing pihak tentang kekerasan yang mereka lakukan satu sama lain.
2. Menyesali secara mendalam kekerasan yang pernah dibuat.
3. Kesiapan untuk meminta maaf atas kekerasan yang pernah dibuat.
4. Kesiapan dari salah satu pihak yang berkonflik untuk menghilangkan kemarahan dan dendam terhadap kelompok lain yang mengakui kesalahan atau melakukan kekerasan.
5. Komitmen pada pelaku kekerasan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
6. Upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan masa lalu yang menimbulkan konflik dan mau merehabilitasi kekerasan dan kerusakan yang ditimbulkan di masa lalu.
7. Siap memasuki hubungan baru yang terbuka secara timbal balik.



## C. Penutup

Setiap konflik sosial dengan kekerasan akan membentuk tiga kelompok besar yang yaitu:

1. Kelompok orang yang langsung terlibat konflik. Ciri kelompok ini antara lain muda terbakar emosinya, penuh prasangka, tidak mudah percaya kepada orang lain selain kelompoknya sendiri.
2. Kelompok orang yang tidak langsung terlibat konflik bersenjata, tetapi merasakan akibat langsungnya, misalnya karena kehilangan sanak keluarga, harta benda, rumah, dan harus tinggal di pengungsian. Ciri-cirinya karena masih memiliki derajat proksimitas tinggi, maka terkadang derajat emosinya juga tinggi walaupun tidak mudah terbakar, karena terkandung rasa takut luar biasa.
3. Kelompok yang tidak langsung terlibat konflik dan tidak langsung terkena akibatnya. Kelompok ini memiliki derajat proksimitas yang tinggi, tetapi tinggal jauh dari lokasi.

Upaya damai dilakukan secara komprehensif di berbagai kelompok itu yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat menghadapi

konflik. Peran komunikasi interpersonal sangat strategis untuk membangun tumbuhnya dialog-dialog. Pada kelompok terakhir, barangkali akan lebih mudah dan cepat menerima upaya damai karena derajat emosinya rendah. Tetapi untuk upaya damai pada kelompok pertama bahkan mungkin peran interpersonal itu masih harus dibantu dengan tindakan pengamanan pihak berwajib. Walaupun demikian pendekatan yang lebih cocok untuk mengatasi konflik adalah mengembangkan dialog-dialog informal di semua lapisan masyarakat. Melalui komunikasi interpersonal secara intensif, persuasi dan mediasi informal seperti tokoh-tokoh agama; tokoh-tokoh masyarakat; tokoh-tokoh pemuda; kepala adat; berperan besar dalam membangun keterbukaan komunikasi di semua lapisan. Ide yang dikembangkan dalam komunikasi itu mengarah kepada transformasi konflik untuk mencapai kerjasama sosial-ekonomi yang lebih adil. Bentuk komunikasi ini akan mengurangi ketegangan sosial (stressstrain), mengurangi prasangka, sehingga konflik kekerasan dapat ditekan; terbangunnya kembali komunikasi dan relasi sosial yang sudah pecah.

## Daftar Pustaka

- Trijono, Lambang (2001), *Keluar Dari Kemelut Maluku*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse (2000), *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lewis, Glen and Christina Slade (1994), *Critical Communication*, Sidney Australia: Prentice Hall.
- Newel, Sara. E and Randall. K stuman (1991), *The Nature Episode of Social Confrontation*, dalam James A, Anderson, *Communication Year Book 14*, London: Sage pub

Pers, Ot  
Demokra

Oleh : Teguh Yu

## Ringkasan :

Peran media massa dalam merevisi gagasan undang-undang tantangan utama, antara lain berisi sebagian (revisi pasal posisi tidak menjalankan s desentralisasi di Indonesia. nyata kecepatan reformasi massa dalam menanggapi p

## Abstract :

The roles of mass media initiative of decentralisation position to accept the revision conflicting articles only), the at all. The choices of the second Whereas, the first and the decentralisation. Therefore,

Keywords: mass media, decentralisation

## A. Pendahuluan

Untuk kesekian kalinya pers dijadikan sebagai goat) terhadap berbagai kebijakan publik nasional pemerintahan Orde Baru, potensi yang besar dalam me ion" diikat sedemikian rup berkutik dan tidak mampu fungsi demokrasi, yaitu kontr

Pers, Otonomi Daerah dan D